



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Kata maaf dari "Parsa", Asistem Virtual DPR
Tanggal : Minggu, 20 Juli 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Kata Maaf dari "Parsa", Asisten Virtual DPR

Parsa, chatbot di situs www.dpr.go.id, tampil layaknya asisten DPR. Sayangnya, setiap ditanyakan mengenai proses pembentukan undang-undang di DPR, Parsa hanya menjawab dengan kata maaf.

Iqbal Basyari

Ada yang harus saat membuka laman situs Dewan Perwakilan Rakyat di www.dpr.go.id. Selain tampilan muka yang berubah ada maskot bergambar perempuan yang selalu muncul di sisi pojok kanan bawah. Ikon tersebut tampil disertai tulisan "Parsa", akronim dari "Parliament Smart Assistant".

Apabila ikon tersebut diklik, penunjung akan dibawa masuk ke aplikasi perancangan WhatsApp. Penunjung akan dihubungkan dengan akun WhatsApp bernama "DPR RI Smart Assistant" dilengkapi logo centang biru.

Ketika diajak mengobrol untuk pertama kali, akan terlihat akan memperkenalkan diri. "Halo, Sobat Parlemen. Selamat datang di layanan WhatsApp resmi DPR RI. Perkenalkan, saya Parsa yang akan membantu Anda hari ini terkait informasi umum DPR RI. Silakan sampaikan pertanyaan Anda".

Akun itu memang akun resmi yang dibuat DPR. Aplikasi Parsa itu diumumkan oleh Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Rizieq, Aulia Rahman Natakusuma bersama Sekretaris Jenderal DPR Indra Sisandar sekitar sebulan lalu, tepatnya pada Rabu (4/6/2025).

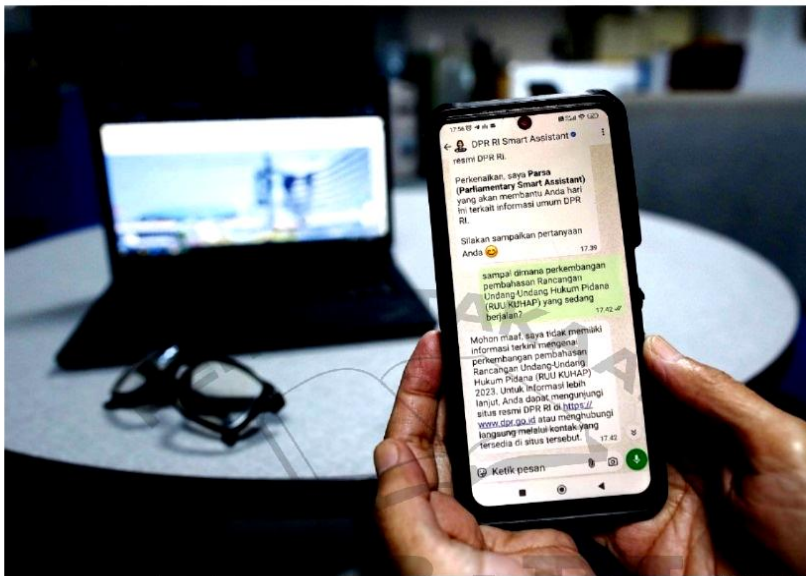
Parsa adalah aplikasi *chatbot* berbasis WhatsApp. Parsa didesain dapat menjawab sejumlah pertanyaan publik, seperti struktur DPR, jadwal kunjungan, pengaduan masyarakat, hingga permintaan dokumen publik. Aplikasi Parsa bahkan dilengkapi fitur interaksi langsung dengan agen manusia melalui *discovery live chat* saat jam kerja.

Lantas, bagaimana rasanya mengobrol dengan Parsa?

Kompas menjajal aplikasi tersebut dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Parsa melalui perancangan di WhatsApp. Pada mulanya, Kompas menanyakan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang sedang berjalan.

Namun, Parsa menjawab, "Mohon maaf, saya tidak memiliki informasi terkini mengenai proses pembahasan RUU KUHP. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs resmi DPR RI di <https://www.dpr.go.id> atau menghubungi langsung melalui kontak yang tersedia di situs tersebut".

Jawaban serupa keluar saat ditanya soal perkembangan pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga



Jawaban yang diterima ketika penunjung mengajukan sebuah pertanyaan kepada Parsa, Sabtu (19/7/2025). Parsa adalah aplikasi *chatbot* berbasis WhatsApp milik DPR yang didesain untuk menjawab sejumlah pertanyaan publik.

(PPIPT). Padahal, kedua RUU tersebut saat ini sedang dibahas oleh DPR dan ramai diperbincangkan publik.

Begini pula saat diminta dokumen daftar inventarisasi masalah (DIM) pembahasan RUU KUHP. Parsa menjawab, "Mohon maaf, saya tidak memiliki akses langsung ke dokumen DIM (daftar inventarisasi masalah) RUU KUHP. Anda dapat mengajukan permintaan dokumen tersebut melalui Portal PPID (Portal Pengelola Informasi dan Dokumentasi) DPR RI di <https://ppid.dpr.go.id>. Proses permintaan data biasanya membutuhkan waktu hingga 10 hari kerja".

Rangkaian kata maaf akhirnya terhenti saat Parsa ditanya mengenai struktur organisasi DPR. Parsa menjelaskan ada empat elemen utama organisasi di DPR, yakni pimpinan DPR, fraksi-fraksi, komisi-komisi, serta alat kelengkapan lainnya.

Masih pengembangan

Sejajar DPR Indra Sisandar mengatakan, Parsa memang sudah dibuka ke publik, tetapi masih dalam pengembangan konten sehingga baru dapat menjawab pertanyaan umum terkait DPR dan kehumasan dengan data yang ada di situs web DPR.

"Pertanyaan-pertanyaan spesifik yang belum terjawab akan dijadikan pembelajaran oleh mesin sehingga semakin lama semakin banyak pertanyaan yang dapat dijawab," ujarnya.

la melanjutkan, DPR akan mengembangkan aplikasi baru bernama Cukrawala. Aplikasi itu akan spesifik menjawab pertanyaan-pertanyaan dari publik. Konal ini akan digunakan untuk membagikan berbagai informasi mengenai DPR.

"Semua hal yang ada di website DPR akan dibuka. Kalau *update* pembahasan, harus menunggu setelah pembahasan

diputuskan," tutur Indra.

Seakan modern

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, memandang, Parsa memiliki banyak keterbatasan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Parsa bahkan sangat sering mengucapkan kata maaf dibandingkan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait isu yang menjadi perhatian publik.

"Sebagai sebuah media informasi, tak ada yang bisa dibantu oleh Parsa," katanya.

Lucius pun mempertanyakan langkah DPR yang meluncurkan aplikasi Parsa meskipun tidak memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Kehadiran Parsa bahkan bisa membuat kritik karena gagal memberikan informasi-informasi penting untuk konstitusi.

Lucius mengadu ada semacam obsesi dari DPR untuk

menperlihatkan bahwa mereka telah berubah menjadi lembaga modern. Oleh karena itu, mereka asal mencoba teknologi informasi yang bisa membuktikan bahwa DPR modern itu bukan cuma mimpi. Padahal, layanan yang mereka berikan tidak didukung dengan informasi yang cepat, aktual, serta komprehensif.

"Jadi tools seperti Parsa ini seperti cuma demi pencitraan saja, biar DPR terkesan maju. DPR (malah) tampak tak peduli dengan cita-cita untuk memastikan informasi publik tersaji melalui aplikasi aplikasi tersebut," ujarnya.

Jika dibandingkan lembaga negara lain, DPR memang terlihat lebih maju dalam penggunaan *chatbot*. Istana kepresidenan saja belum memiliki *chatbot* sehingga pencarian informasi mengenai *update* kegiatan kepresidenan masih terputus melalui situs web www.presidentri.go.id. Melalui situs tersebut, publik dapat

mengakses siaran pers, foto, video, dan transkrip pernyataan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara *chatbot* yang sudah diumumkan masih terbatas untuk layanan "Lapor Mas Wapres". Publik dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui kanal tatap muka di Kantor Sekretaris Wakil Presiden ataupun layanan *chatbot* WhatsApp. Masyarakat dapat mengirim laporan, memantau status laporan, dan mengirim data pendukung tambahan melalui *chatbot* Lapor Mas Wapres di nomor 628117042304.

Salah satu lembaga yang sudah memanfaatkan *chatbot* WhatsApp adalah BPJS Kesehatan. Namun, *chatbot* bernama Layanan Pandawa hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan administrasi, informasi, dan pengaduan.

Adapun di lembaga yudikatif, layanan informasi juga belum sampai dalam bentuk *chatbot* WhatsApp. Informasi

mengenai jadwal sidang ataupun status perkara hanya dapat diakses melalui situs web Layanan Informasi melalui nomor WhatsApp biasanya berbeda-beda di tiap pengadilan.

Asas keterbukaan

Lucius bisa memahami maksud dan tujuan DPR meluncurkan aplikasi Parsa. DPR berupaya memenuhi prinsip keterbukaan serta pelibatan bermakna publik dalam setiap pengambilan kebijakan.

Terlebih, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XII/2024 yang di-bacakan 17 Juli lalu menegaskan agar ke depan pembentukan undang-undang lebih memak-simalkan proses partisipasi publik dengan penggunaan teknologi informasi yang dikelola dengan baik. Dengan demikian, sekalipun dalam proses partisipasi pembahasan rancangan undang-undang tidak bertemu secara fisik, hak masyarakat untuk berpartisipasi tetap terkomodifikasi.

Pengawasan itu sejalan dengan asas keterbukaan yang dimaksud dalam Pasal 5 Huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Meski demikian, lanjut Lucius, membuat aplikasi saja tidaklah cukup. DPR punya tugas untuk terlebih dahulu memastikan adanya informasi, sekaligus mendokumentasikan informasi secara cepat, aktual, dan terata. Percuma ada aplikasi kalau DPR tidak pernah konsisten mendokumentasikan informasi dan data untuk disajikan secara cepat untuk publik.

"Sera kira kelemahan utama DPR dari dulu ada pada soal ketersediaan informasi dan pendokumentasian yang lengkap atas informasi informasi penting sehingga bisa diandalkan," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Lucius, ke depan, informasi yang semestinya dapat diberikan kepada publik utamanya adalah segala sesuatu yang dibicarakan, dibahas, hingga diputuskan DPR di berbagai alat kelengkapan dewan (AKD). Informasi mengenai proses beserta ide-ide yang dibicarakan dalam rangka membuat sebuah kebijakan harus bisa disajikan setiap saat.

Dengan demikian, publik punya basis atau rujukan prinsip dan gagasan yang bermanfaat untuk didiskusikan sehingga dapat melahirkan masukan atau aspirasi. Basis informasi yang didapatkan dari aplikasi resmi DPR pun memadai sehingga tak ada lagi kata maaf yang terus berulang.